



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 125 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan guna menunjang program wajib belajar, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri;
- b. bahwa sehubungan adanya penggabungan satuan pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar sesuai dengan Hasil Kajian Dinas Pendidikan tentang Penggabungan/Merger Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Garut Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

Memperhatikan : Kajian Dinas Pendidikan tentang Penggabungan/Merger Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Garut Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 - 8 - 2021
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

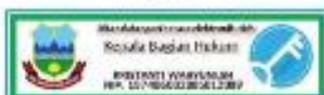
**Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 - 8 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

t t d

**NURDINYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 125**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 125 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 60
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL NEGERI

PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

A. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN/KAMPUNG	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
TK NEGERI				
1	TKN Pembina Tarogong Kidul	Jl. Patriot Blk. No. 3	Sukagalih	Tarogong Kidul
2	TKN Pembina Pamulihan	Kp. Cisandaan	Panajung	Pamulihan
3	TKN Pembina Cikelet	Jl. Raya Cikelet	Cikelet	Cikelet
SD NEGERI				
1	SDN 1 Banjarwangi	Jl. Raya Banjarwangi	Banjarwangi	Banjarwangi
2	SDN 2 Banjarwangi	Kp. Salempet	Banjarwangi	Banjarwangi
3	SDN 3 Banjarwangi	Jl. Raya Banjarwangi No. 80	Banjarwangi	Banjarwangi
4	SDN 4 Banjarwangi	Kp. Pasirpogor	Banjarwangi	Banjarwangi
5	SDN 1 Talagasari	Kp. Mariuk	Talagasari	Banjarwangi
6	SDN 2 Talagasari	Kp. Pasirhaur	Talagasari	Banjarwangi
7	SDN 3 Talagasari	Kp. Pasirhamerang	Talagasari	Banjarwangi
8	SDN 4 Talagasari	Kp. Pasirhaur	Talagasari	Banjarwangi
9	SDN 1 Bojong	Kp. Tanjungsari	Bojong	Banjarwangi
10	SDN 2 Bojong	Kp. Cimenyan	Bojong	Banjarwangi
11	SDN 3 Bojong	Kp. Bantarpeundeuy	Bojong	Banjarwangi
12	SDN 1 Dangiang	Kp. Dangiang	Dangiang	Banjarwangi
13	SDN 2 Dangiang	Kp. Cikoneng	Dangiang	Banjarwangi
14	SDN 3 Dangiang	Kp. Babakan Salam	Dangiang	Banjarwangi
15	SDN 1 Padahurip	Kp. Jamilega	Padahurip	Banjarwangi
16	SDN 2 Padahurip	Kp. Padahurip	Padahurip	Banjarwangi
17	SDN 3 Padahurip	Kp. Bungbulang	Padahurip	Banjarwangi
18	SDN 4 Padahurip	Kp. Padahurip	Padahurip	Banjarwangi
19	SDN 1 Kadongdong	Kp. Parungjawa	Kadongdong	Banjarwangi
20	SDN 2 Kadongdong	Kp. Najahan	Kadongdong	Banjarwangi

1	2	3	4	5
53	SDN 1 Dangdeur	Kp. Pasir Muncang	Dangdeur	Banyuresmi
54	SDN 2 Dangdeur	Kp. Bojonggede	Dangdeur	Banyuresmi
55	SDN 1 Sukakarya	Kp. Babakan	Sukakarya	Banyuresmi
56	SDN 2 Sukakarya	Kp. Burungayun	Sukakarya	Banyuresmi
57	SDN 3 Sukakarya	Kp. Babakan	Sukakarya	Banyuresmi
58	SDN 4 Sukakarya	Kp. Babakan	Sukakarya	Banyuresmi
59	SDN 1 Pamekarsari	Kp. Serut	Pamekarsari	Banyuresmi
60	SDN 2 Pamekarsari	Kp. Pungkur	Pamekarsari	Banyuresmi
61	SDN 3 Pamekarsari	Kp. Ngompod	Pamekarsari	Banyuresmi
62	SDN 4 Pamekarsari	Kp. Cigaruguy	Pamekarsari	Banyuresmi
63	SDN 1 Binakarya	Kp. Balakasap	Binakarya	Banyuresmi
64	SDN 2 Binakarya	Kp. Pasirkaliki	Binakarya	Banyuresmi
65	SDN 3 Binakarya	Kp. Ciparongpong	Binakarya	Banyuresmi
66	SDN 1 Bagendit	Kp. Bantarjati	Bagendit	Banyuresmi
67	SDN 2 Bagendit	Kp. Parigi	Bagendit	Banyuresmi
68	SDN 3 Bagendit	Kp. Sargenteng	Bagendit	Banyuresmi
69	SDN 4 Bagendit	Kp. Parung	Bagendit	Banyuresmi
70	SDN 1 Karyamukti	Kp. Babakan Loa	Karyamukti	Banyuresmi
71	SDN 2 Karyamukti	Kp. Ranjeng	Karyamukti	Banyuresmi
72	SDN 1 Karyasari	Kp. Sikhuk	Karyasari	Banyuresmi
73	SDN 2 Karyasari	Kp. Curug	Karyasari	Banyuresmi
74	SDN 1 Sukamukti	Kp. Tarikolot	Sukamukti	Banyuresmi
75	SDN 2 Sukamukti	Kp. Kubang	Sukamukti	Banyuresmi
76	SDN 3 Sukamukti	Kp. Tarikolot	Sukamukti	Banyuresmi
77	SDN 4 Sukamukti	Kp. Kiaralawang	Sukamukti	Banyuresmi
78	SDN 1 Sukalaksana	Kp. Bojong Jengkol	Sukalaksana	Banyuresmi
79	SDN 2 Sukalaksana	Kp. Babakan Pariuk	Sukalaksana	Banyuresmi
80	SDN 1 Bayongbong	Jl. Bayongbong Kp. Kaum	Bayongbong	Bayongbong
81	SDN 2 Bayongbong	Jl. Raya Bayongbong	Bayongbong	Bayongbong
82	SDN 3 Bayongbong	Jl. Asrama Polisi	Bayongbong	Bayongbong
83	SDN 4 Bayongbong	Kp. Sukasari	Bayongbong	Bayongbong
84	SDN 5 Bayongbong	Kp. Sukahejo	Bayongbong	Bayongbong
85	SDN 6 Bayongbong	Jl. Asrama Polisi bayongbong	Bayongbong	Bayongbong
86	SDN 1 Ciela	Kp. Ciela	Ciela	Bayongbong